



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PPSALHK

Tahun Anggaran 2023



PPSALHK



Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- D. Sumber Daya Manusia
- E. Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang PPLH

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Renstra Direktorat PPSALHK 2020 – 2024
- B. Rencana Kinerja Direktorat PPSALHK 2023
- C. Anggaran Kegiatan
- D. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran dan Fisik
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPSALHK) mempunyai komitmen untuk mewujudkan institusi yang akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Komitmen yang harus dicapai Direktorat PPSALHK telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, Rencana Kerja Tahun 2023, Rencana Aksi Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PPSALHK Tahun 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 ini, diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi sehingga ke depan dapat lebih produktif, efektif, dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

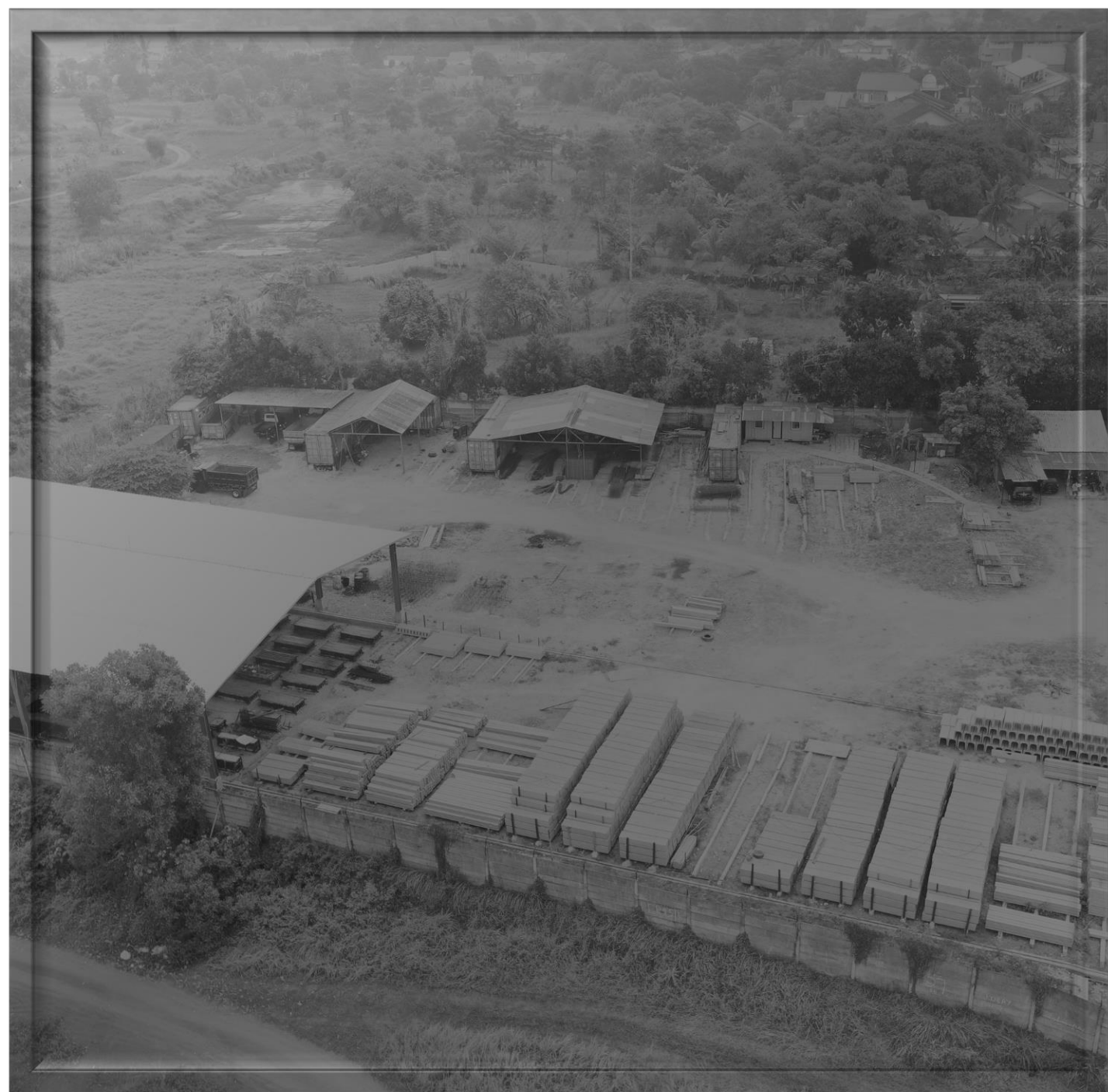
Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PPSALHK Tahun 2023 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.

Jakarta, 15 Januari 2024

Direktur,



Ardyanto Nugroho, S.Hut., M.M
NIP 198003312003121003



BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020 berimplikasi pada perubahan aturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum dengan menganut prinsip *ultimum remedium* mengutamakan penerapan sanksi administratif sebelum dikenakan pidana, menjadi tantangan baru bagi unit kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPSALHK) sebagai salah satu unit eselon II Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) yang memiliki peran sangat strategis dalam pelaksanaan penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sanksi administratif dituntut harus dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta melakukan praktik pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat PPSALHK memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Adapun fungsi yang dimiliki yaitu penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan dan penerapan sanksi administrasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat PPSALHK telah menyusun Rencana Strategis (renstra) Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Nomor SK.22/PPSA/PPN/GKM.0/11/2020 yang telah direvisi melalui Keputusan Direktur PPSALHK Nomor SK.5/PPSALHK/TU/GKM.0/2/2022. Renstra tersebut berisi target dan indikator kinerja kegiatan yang hendak dicapai serta perencanaan anggarannya. Renstra dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) untuk target serta indikator yang hendak dicapai dan diikrarkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pertanggungjawaban pelaksanaan rencana kerja dan perjanjian kinerja dituangkan dalam laporan kinerja (LKJ).

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKJ) pada setiap akhir tahun kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

disusunnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai pertanggungjawaban kepada publik (akuntabilitas publik) secara administrasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat PPSALHK Tahun 2023.

TUJUAN :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kerjanya.

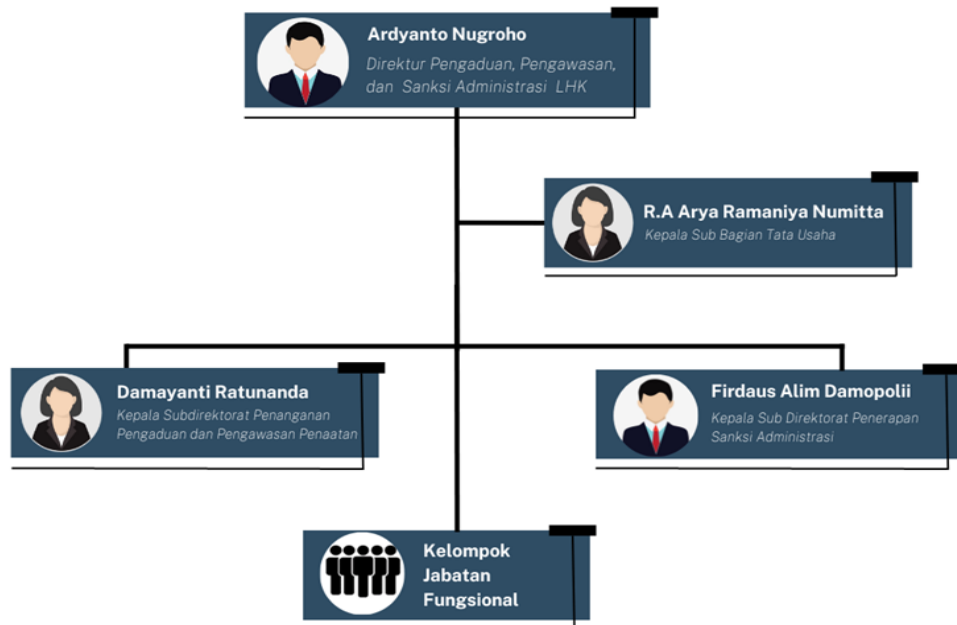
C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat PPSALHK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan, dan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PPSALHK menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

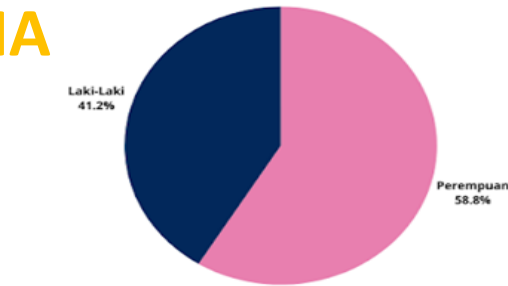
Struktur Organisasi Direktorat PPSALHK



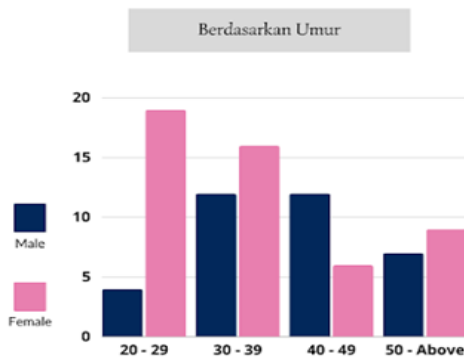
Penanganan pengaduan meliputi kegiatan penelaahan, verifikasi dan upaya penegakan hukum terhadap pengaduan kasus di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan memberikan kepastian kepada pengadu apakah pengaduan tersebut terbukti atau tidak terbukti. Sedangkan pengawasan penataan dapat dikatakan sebagai salah satu upaya preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan memastikan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan pemerintah serta peraturan dan ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun Penerapan Sanksi Administrasi merupakan langkah tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan dan juga pengawasan penataan apabila terjadi pelanggaran terhadap perizinan maupun peraturan perundang-undangan. Sanksi Administratif ini merupakan perangkat hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan.

Sanksi Administratif ini merupakan perangkat hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan.

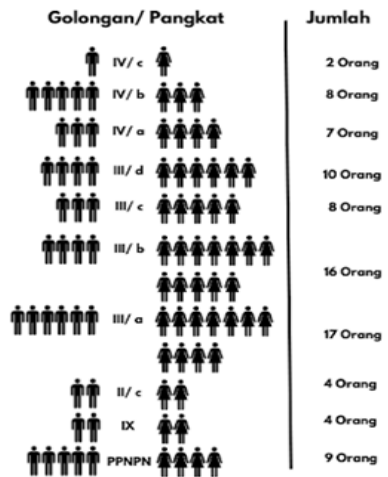
D. SUMBER DAYA MANUSIA



Berdasarkan Jenis Kelamin
 Laki-Laki 35 Orang
 Perempuan 50 Orang



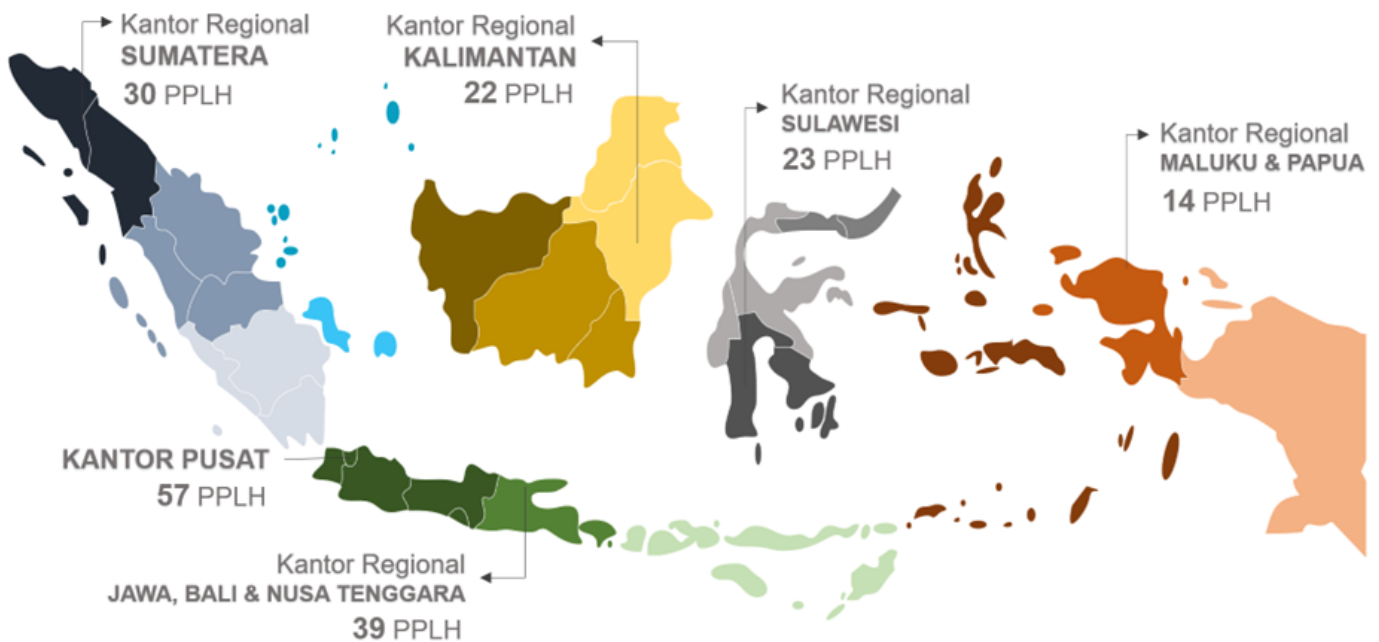
Berdasarkan Golongan



Jumlah dan Komposisi Pegawai Direktorat PPSALHK Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin

Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPSALHK) sampai saat ini memiliki jumlah pegawai sebanyak 85 orang, terdiri dari 72 orang PNS, 4 orang PPPK, dan 9 orang PPNPN yang tersebar di masing-masing sub direktorat dan subbagian tata usaha. Dari jumlah pegawai tersebut apabila dilihat dari pangkat dan golongan, maka pegawai Direktorat PPSALHK terdiri dari pangkat dan golongan IV/c sebanyak 2 orang, IV/b sebanyak 8 orang, IV/a sebanyak 7 orang, III/d sebanyak 10 orang, III/c sebanyak 8 orang, III/b sebanyak 16 orang, III/a sebanyak 17 orang, II/c sebanyak 4 orang, pegawai PPPK golongan IX sebanyak 4 orang, dan pegawai PPNPN sebanyak 9 orang. Berdasarkan jenis kelamin, pembagian pegawai Direktorat PPSALHK terdiri dari 35 orang laki-laki dan 50 orang Perempuan.

Di samping jumlah pegawai tersebut, Direktorat PPSALHK membawahi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (PLH). Jabatan fungsional PLH memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup sebagaimana fungsi penanganan pengaduan dan pengawasan yang dimiliki Direktorat PPSALHK. Secara keseluruhan, per Januari 2023 jumlah PLH yang dimiliki Ditjen Gakkum LHK sebanyak 185 orang dengan penempatan pada Direktorat PPSALHK, Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHPLHK) dan 5 wilayah BPPHLHK. Adapun penempatan PLH Ditjen Gakkum LHK tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan distribusi sebagai berikut:



Peta Sebaran Pengawas Lingkungan Hidup Ditjen Gakkum LHK



E. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Acuan Peraturan

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: (mengatur sampai pada konkuren dalam kategori tidak terkait pelayanan dasar)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 – diganti dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
3. PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Keterangan:

— : Fungsi komando

..... : Fungsi koordinasi

Fungsi Komando antara Dit PPSA dengan DLH Prov, Kab/Kota dalam hal:

1. Pembinaan PPLH (Pasal 490 PP 22/2021);
2. Pembinaan Terkait Perizinan Berusaha dan ketentuan teknis bidang LH;
3. Pembinaan melalui pemberian NSPK;
4. Dukungan sarana dan prasarana;
5. Pengambilalihan kewenangan pengawasan LH dan penerapan SA (pengawasan lapis kedua);

Fungsi Koordinasi Dit. PPSALHK dengan DLH Prov, Kab/Kota

1. Penanganan pengaduan;
2. Pelibatan PLH Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengawasan;
3. Koordinasi pemenuhan sanksi administrasi oleh usaha dan/atau kegiatan;

A worker wearing a white hard hat and a dark jacket with "GAKKUI" on the back is walking away from the camera down a long, brightly lit aisle in a textile factory. The aisle is lined with large spools of white thread on the left and large blue and orange containers on the right. The ceiling is high with many fluorescent lights.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT PPSALHK 2020 S.D. 2024

Di dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Revisi), disampaikan 4 (empat) tujuan yaitu:

- a. Kondisi lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim;
- b. Aktualisasi potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
- c. Pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan;
- d. Tata kelola pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, ditetapkan sasaran strategis Kementerian LHK untuk kurun waktu tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- b. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah
- c. Menurunnya emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon
- d. Menurunnya laju penyusutan hutan
- e. Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah
- f. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan
- g. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting
- h. Meningkatnya penerimaan negara dari lingkungan hidup dan kehutanan
- i. Terselesaikannya status Kawasan hutan yang diakui secara legal dan *legitimate*
- j. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata
- k. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024. Sasaran Strategis tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 5 (lima) program, salah satunya adalah "Program Kualitas Lingkungan Hidup" dengan sasaran program meningkatnya kualitas hidup yang pengelolaannya dikuasakan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK)



Direktorat PPSALHK sebagai unit eselon II dari Ditjen bertanggung jawab mengawal Indikator Kinerja Program tersebut dengan menjabarkannya pada Kegiatan berupa: “Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi” dengan penjabaran sebagai berikut:

Program: Kualitas Lingkungan Hidup



Penjabaran Sasaran Strategis sampai dengan Kegiatan PPSALHK

Berdasarkan kegiatan tersebut, Direktorat PPSALHK telah menyusun Rencana Strategis tahun 2020 s.d. 2024 (Revisi) dengan menjabarkan melalui sasaran kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut.



Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Direktorat PPSALHK

B. Rencana Kinerja

Direktorat PPSALHK Tahun 2023

Direktorat PPSALHK sebagai penanggung jawab kegiatan penanganan pengaduan, pengawasan penataan dan penerbitan sanksi administrasi difungsikan untuk mengawal dan melaksanakan pencapaian Indikator Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilakukan dengan menetapkan **Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi**. Dalam rangka mendukung kegiatan yang hendak dicapai, ditetapkan Sasaran Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Sasaran Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023
Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK
	Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya
	Jumlah penerapan sanksi administratif pada permasalahan penggunaan kawasan hutan

Sesuai dengan Renstra Ditjen Gakkum LHK tahun 2020-2024 (Revisi), sasaran kegiatan Direktorat PPSALHK tahun 2023 dipastikan pencapaiannya dengan mengurai langkah-langkah pencapaiannya di setiap kegiatan sedemikian rupa sehingga seluruh kegiatan yang telah disetujui pada proses trilateral meeting (KLHK-BAPPENAS-Kemenkeu) dan sesuai dengan hasil RKP memiliki kontribusi yang relevan terhadap pencapaian sasaran kegiatan seperti disajikan pada tabel berikut.

**Tabel Kegiatan Penanganan Pengaduan,
Pengawasan dan Sanksi Administrasi**

Kegiatan K/L	Sasaran Kegiatan	Output	Target
Penanganan Pengaduan, Pengawasan Izin dan Sanksi Administrasi	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	423 Badan Usaha
		Jumlah PLH yang ditingkatkan kapasitasnya	370 Orang
		Jumlah penerapan sanksi administratif pada permasalahan penggunaan Kawasan hutan	50 Badan Usaha

C. Anggaran Kegiatan

Berdasarkan DIPA Nomor: SP DIPA-029.10.1.465025/2023 tanggal 30 November 2022 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2023 Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat PPSALHK pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp. 15.077.316.000 (lima belas milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), kemudian terdapat penambahan pagu dari anggaran PNPB sebesar Rp. 7.065.570.000 (tujuh milyar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga anggaran yang dapat digunakan Direktorat PPSALHK sebesar Rp.22.142.886.000 (dua puluh dua milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Adapun rincian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Direktorat PPSALHK pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Anggaran Direktorat PPSALHK Tahun 2023

No	Komponen Kegiatan	Anggaran (Rp)
Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Rp 3.220.000.000
Peningkatan Kapasitas PLH		
1	PLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Rp 3.220.000.000
Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha		Rp 18.922.886.000
Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK		Rp 18.822.886.000
1	Penanganan Pengaduan Perusahaan	Rp 4.533.388.000
2	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	Rp 954.844.000
3	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp 7.898.211.000
4	Sanksi Administrasi	Rp 2.912.642.000
5	Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Rp 2.523.801.000
Sanksi Administratif Badan Usaha pada Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan		Rp 100.000.000
1	Penerapan Denda Administrasi Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	Rp 100.000.000
Jumlah		Rp 22.142.886.000

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini menjadikan komitmen penerima amanah dalam hal ini Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah yaitu Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perencanaan kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat PPSALHK Tahun 2023, maka Direktur PPSALHK telah menandatangani dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan target sebagai berikut.

Perjanjian Kinerja Direktorat PPSALHK Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	423 Badan Usaha
		Jumlah PLH yang ditingkatkan kapasitasnya	370 Orang
		Jumlah penerapan sanksi administratif pada permasalahan penggunaan Kawasan hutan	50 Badan Usaha



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Berdasarkan DIPA Nomor: SP DIPA-029.10.1.465025/2023 tanggal 30 November 2022 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2023 Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat PPSALHK pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp. 15.077.316.000 (lima belas milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), kemudian terdapat penambahan pagu dari anggaran PNBPNP sebesar Rp. 7.065.570.000 (tujuh milyar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga anggaran yang dapat digunakan Direktorat PPSALHK sebesar Rp.22.142.886.000 (dua puluh dua milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Adanya penambahan pagu dari anggaran PNBPNP tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan. Pada tahun 2023 telah disusun 11 (sebelas) pedoman pengawasan tematik yang selanjutnya akan disosialisasikan kepada PLH di seluruh daerah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan. Di samping itu, Direktorat PPSALHK juga melakukan beberapa pengawasan tematik sesuai dengan adanya resiko pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang krusial dan turut menjadi perhatian publik, meliputi pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan, pengawasan pengendalian pencemaran udara di wilayah Jabodetabek, verifikasi lapangan terhadap pencemaran Sungai Sagea, penegakan hukum terhadap Peleburan Logam Cikande, serta penanganan kasus tumpahan minyak di beberapa wilayah perairan Sumatera dan Maluku. Dalam penanganan kasus tersebut tim pengawas Direktorat PPSALHK turut melibatkan ahli untuk melakukan berbagai kajian terkait yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang komprehensif.

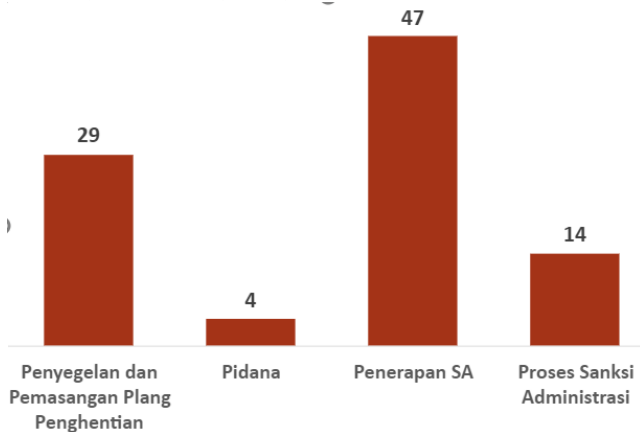
Highlight Kasus Pencemaran/ Perusakan Lingkungan Hidup

Pengawasan Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek

Direktorat PPSALHK melakukan pengawasan terhadap 63 perusahaan di wilayah Jabodetabek dengan sebaran lokasi sebagai berikut:



Tindak lanjut hasil pengawasan PPU Jabodetabek:



Kebakaran Hutan dan/atau Lahan



Selama 2023 diterbitkan

353 Surat Peringatan
Karhutla

40 Pengawasan Penataan
Karhutla

Catatan: dikenakan SA 8, 32 rekom SA



Pencemaran Sungai Sagea

Aduan Save Sagea perihal dugaan pencemaran Sungai Sagea dan Perusakan Goa Bakimaruru akibat aktivitas pertambang nikel dan smelter dari PT IWIP, PT WBN, PT FPM, PT TE dan PT HSM.

Dit PPSALHK bekerjasama dengan Lembaga Penelitian PULIK UNPAD untuk melakukan kajian kondisi geohidrologi di DAS Sagea dan Gua Bokimaruru serta pemetaan konflik sosial dengan hasil berdasarkan analisa Isotop bahwa kegiatan pertambangan nikel berkontribusi terhadap terjadinya kekeruhan di Sungai Sagea.



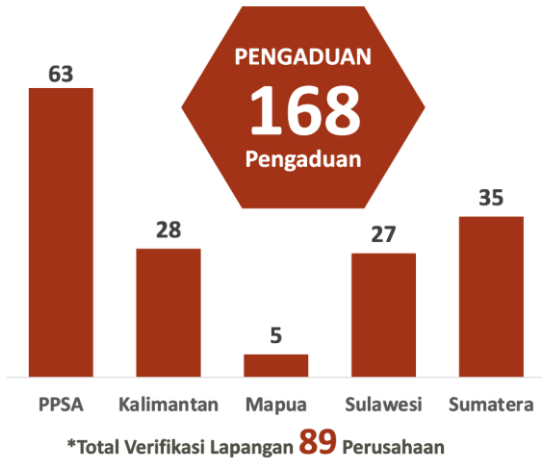
Peleburan Logam Cikande

Dilakukan verifikasi lapangan ke 8 industri peleburan logam di Kawasan Industri Cikande di Tangerang dan sekitarnya

No	Perusahaan	Tindak Lanjut
1.	PT XLI	Penegakan Hukum Pidana
2.	PT HHS	SA & Penegakan Hukum Pidana
3.	PT CMMI	Penegakan Hukum Pidana
4.	PT CS	SA & Penegakan Hukum Pidana
5.	PT LESI	SA & Penegakan Hukum Pidana
6.	PT GRS	SA & Penegakan Hukum Pidana
7.	PT SBJM	Sanksi Administratif
8.	PT CBS	Sanksi Administratif



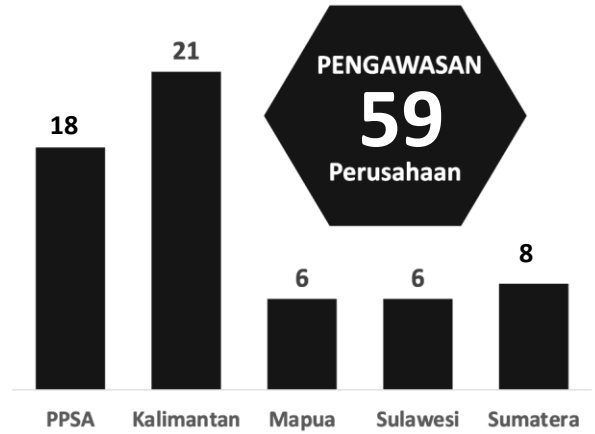
Pengaduan, Pengawasan dan SA Pertambangan



*Total Verifikasi Lapangan **89** Perusahaan

Tindak Lanjut:

- Sanksi Administrasi 24
- Pidana 16
- PSLH 4
- pelimpahan pemda 28
- penyusunan rekomendasi 17
- proses penyelesaian 30
- pengaduan tidak terbukti 21
- Operasi yustisi 10
- Lain-lain 18



Catatan:

Pengawasan reguler 6 badan usaha
Pengawasan SA 53 badan usaha

Tindak Lanjut:

- Pencabutan SA 10
- Paksaan pemerintah 6
- Surat Peringatan 42
- Perusahaan Tutup 1



Kasus Tumpahan Minyak

Tumpahan aspal/ bitumen di Kab. Nias Utara Sumatera Utara (Februari 2023)



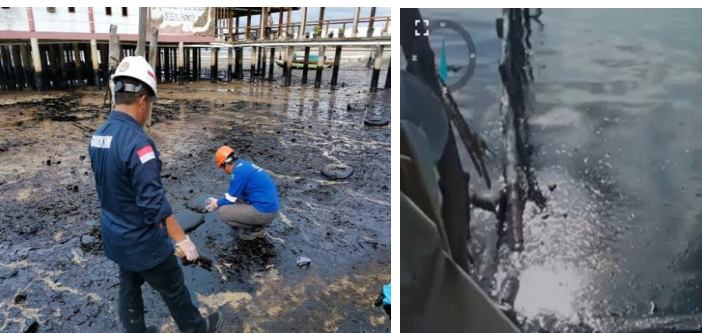
Tindak lanjut oleh PHP dan PSLH

Jatuhnya kontainer berisi bahan kimia, Kab. Buru, Maluku (Maret 2023)



Tindak lanjut oleh Polres Buru

Tumpahan minyak Di provinsi Kepulauan Riau (Mei 2023)



Tindak lanjut oleh PHP

Kasus Masuknya Limbah B3 di wilayah NKRI, Perairan Kota Batam (Juni 2023)



Tindak lanjut oleh PHP

Tumpahan minyak, Prov. Lampung (Agustus 2023)



Tindak lanjut oleh PHP

Pengelolaan Sampah

TPS KAMPUNG GINTUNG	TPA RAWA KUCING	TPS ILEGAL LIMO
Terdapat 8 TPS ilegal yang dikelola masyarakat di Desa Gintung, Sukadiri, Kab. Tangerang (pemilahan sampah bernilai ekonomis)	Terjadi kebakaran pada TPA Rawa Kucing di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang pada tanggal 20 Oktober 2023 seluas 10 Ha selama 4 hari	Terjadi kebakaran pada TPS Limo di Kota Depok pada 22 Oktober 2023 seluas 900 m ² (diduga kuat dibakar oleh penanggung jawab kegiatan)
Telah dilakukan verifikasi lapangan, pemeriksaan terhadap para penanggung jawab usaha dan pemasangan plang segel dan PPLH line untuk menghentikan pelanggaran tertentu	Telah dilakukan verifikasi lapangan, pengujian kualitas udara ambien dengan hasil menunjukkan parameter PM2,5, TSP, Ozon dan Timbal melebihi baku mutu	Dit. PPSALHK diundang dalam rapat koordinasi penanganan TPS Limo dengan Dinas Tata Ruang Kota Depok secara daring
Status saat ini plang segel belum dicabut atas permintaan Camat Sukadiri	Status saat ini telah dilakukan pelimpahan kepada Direktorat PHP	Status belum ada tindak lanjut



Selama periode tahun 2023 terdapat 66 pengaduan terkait pembakaran dan pengelolaan sampah dengan status sebagai berikut:

Status Penanganan Pengaduan	Pembakaran Sampah	Pengelolaan Sampah	Grand Total
Proses Penyelesaian	6	7	13
Pelimpahan ke Pemda	20	21	41
Pengaduan tidak terbukti		5	5
Sektor Lain	2	3	5
Unit Lain	1	1	2
Jumlah	29	37	66

A. CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PPSALHK

Pengukuran capaian kinerja dilakukan setiap tahun untuk mengetahui capaian kinerja yang dihasilkan dalam rangka mendukung program yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen Gakkum LHK Tahun 2020-2024 (Revisi), Renstra Direktorat PPSALHK Tahun 2020-2024 (Revisi) dan Renja Direktorat PPSALHK Tahun 2023.

Direktorat PPSALHK sebagai penanggung jawab salah satu kegiatan Program Penegakan Hukum LHK, yaitu Kegiatan penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang harus dicapai pada tahun 2023. IKK Direktorat PPSALHK dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani Direktur PPSALHK sebagai komitmen pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK atas pencapaian kinerja kegiatan tahun 2023. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat PPSALHK seperti disajikan pada tabel di bawah ini.

Target dan Realiasi IKK Direktorat PPSALHK Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	423 Badan Usaha	599 Badan Usaha	141%
		Jumlah PLH yang ditingkatkan kapasitasnya	370 Orang	438 Orang	118%
		Jumlah penerapan sanksi administratif pada permasalahan penggunaan Kawasan hutan	50 Badan Usaha	50 Badan Usaha	100%

IKK 1 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK

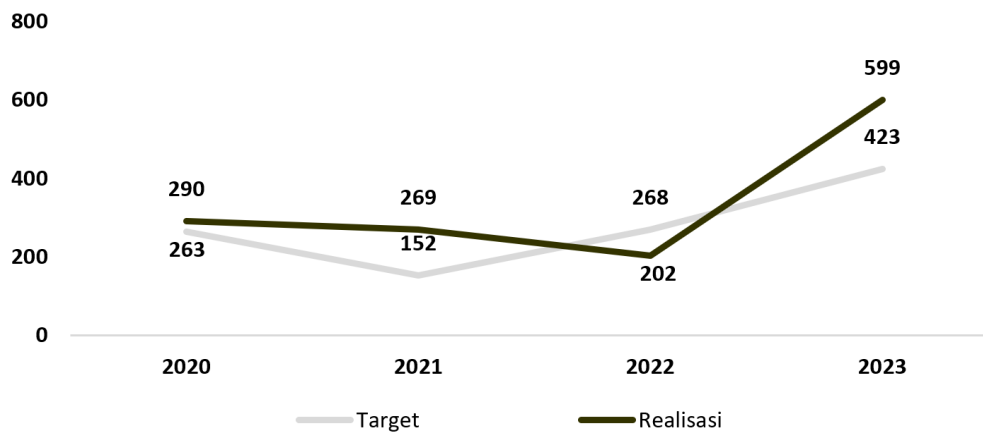
IKK jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK secara tidak langsung turut mendukung Ditjen Gakkum LHK sebagai pengampu program prioritas nasional ke-enam yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim untuk Program Prioritas 1: “Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan kegiatan prioritas “Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup” dengan proyek prioritas nasional “Penguatan sistem perizinan, pengawasan dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup”. Perwujudan proyek prioritas nasional tersebut dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PPSALHK untuk melaksanakan penanganan pengaduan, pengawasan penataan dan penerapan sanksi administrasi.

IKK ini terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu penanganan pengaduan perusahaan, penanganan pengaduan non perusahaan, pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sanksi administrasi dan dukungan teknis pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi. Dari target IKK 423 badan usaha, Direktorat PPSALHK mampu mencapai 599 perusahaan atau sekitar 141%. Secara rinci, capaian dari masing-masing komponen tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Kegiatan, Target dan Realisasi Direktorat PPSALHK 2023

KRO	RO	Komponen	Target	Realisasi
Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Pengawasan ketaatan LHK terhadap badan usaha	Penanganan pengaduan perusahaan	205 Badan usaha	347 Badan usaha
		Penanganan pengaduan non perusahaan	230 Badan usaha	230 Badan usaha
		Pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan	218 Badan usaha	252 Badan usaha
		Sanksi administrasi	240 sanksi	426 sanksi
		Dukungan teknis pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi	1 Layanan	1 Layanan
Total				599 Badan Usaha

Secara *time series*, Perbandingan target dan realisasi IKK 1 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana kerja dan perjanjian kinerja tahun 2020 s.d 2023 tergambar dalam grafik berikut:



Grafik Perbandingan Target dan Realisasi IKK 1

Pada tahun 2022 capaian IKK berada di bawah target yang ditetapkan sehubungan dengan adanya *automatic adjustment* sehingga anggaran yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pengawasan sebesar 65% dari anggaran awal, sementara target IKK mengalami pengurangan 10 badan usaha dan/atau kegiatan. Meskipun demikian, pada tahun 2023 dengan berbagai upaya optimalisasi sumber daya yang telah dilakukan, Direktorat PPSALHK mampu mencapai realisasi IKK sebesar 599 badan usaha dan/atau kegiatan dari target 423 badan usaha dan/atau kegiatan atau sebesar 141% dari target.

a. Komponen Penanganan Pengaduan Perusahaan dan Penanganan Pengaduan Non Perusahaan

Direktorat PPSALHK telah berupaya memperluas jangkauan penerimaan pengaduan masyarakat melalui berbagai *platform* yaitu website, aplikasi, media sosial, email, surat, atau bisa dengan penyampaian langsung ke kantor Direktorat PPSALHK. Di samping itu, telah dilakukan pengembangan kanal penerimaan pengaduan melalui dengan sistem Whatsapp Bot di nomor +628111043994. Pada sistem ini para Pengadu akan dipandu untuk melakukan registrasi pengaduan serta pemantauan terhadap pengaduan yang pernah dilaporkan dibantu oleh PINA (Pengaduan Inteligense Assistant), virtual assistant yang akan secara otomatis membalas pesan pengadu saat menyampaikan aduan maupun menanyakan informasi tindak lanjut pengaduan.

Di samping itu, pada tahun 2023 Direktorat PPSALHK telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Sekretariat pengaduan atau Pos Pengaduan melalui Surat Edaran Direktur PPSALHK nomor SE.1/PPSALHK/TU/GKM.0/7/2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Sekretariat Pengaduan atau Pos Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan. Standar ini diberlakukan untuk lingkup Direktorat PPSALHK dan Balai Gakkum se-Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam surat edara ini meliputi:

- a) Sarana dan Prasarana Sekretariat/ Pos Pengaduan
- b) Sumber Daya Manusia Personil Penerimaan Pengaduan pada Sekretariat/ Pos Pengaduan
- c) Waktu Operasional
- d) Sistem, mekanisme dan prosedur penerimaan pengaduan
- e) Biaya/ tarif
- f) Produk pelayanan
- g) Pengelolaan Basis Data dan Pelaporan
- h) Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan tahun 2023 lingkup Ditjen Gakkum LHK yang dilaksanakan pada tanggal 3-4 Agustus 2023, Pos Pengaduan yang dimiliki oleh Ditjen Gakkum LHK sebagian besar telah memenuhi standar pelayanan minimal. Saat ini lokasi pos pengaduan telah tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia sebagai berikut:

1. Wilayah Sumatera

- a) Balai Gakkum Sumatera/ Seksi Wilayah 1- Medan, Sumatera Utara
- b) Seksi Wilayah 2- Pekanbaru, Riau
- c) Seksi Wilayah 3- Palembang, Sumatera Selatan
- d) Pos Gakkum Batam, Kepulauan Riau
- e) Pos Gakkum Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
- f) Pos Gakkum Jambi, Jambi
- g) Pos Gakkum Padang, Sumatera Barat
- h) Pos Gakkum Bengkulu, Bengkulu
- i) Pos Gakkum Lampung, Lampung
- j) Pos Gakkum Aceh, Aceh

2. Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara

- a) Balai Gakkum Jabalnusra/ Seksi Wilayah 2- Surabaya, Jawa Timur
- b) Seksi Wilayah 1- Jakarta Pusat, DKI Jakarta
- c) Seksi Wilayah 3- Kupang, Nusa Tenggara Timur
- d) Pos Gakkum Yogyakarta, DIY
- e) Pos Gakkum Semarang, Jawa Tengah
- f) Pos Gakkum Bandung, Jawa Barat
- g) Pos Gakkum Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur
- h) Pos Gakkum Denpasar, Bali
- i) Pos Gakkum Mataram, Nusa Tenggara Barat

3. Wilayah Kalimantan

- a) Balai Gakkum Kalimantan/ Seksi Wilayah 2- Samarinda, Kalimantan Timur
- b) Seksi Wilayah 1- Palangkaraya, Kalimantan Tengah
- c) Seksi Wilayah 3- Pontianak, Kalimantan Barat
- d) Pos Gakkum Banjarbaru, Kalimantan Selatan
- e) Pos Gakkum Tanjungselor, Kalimantan Utara

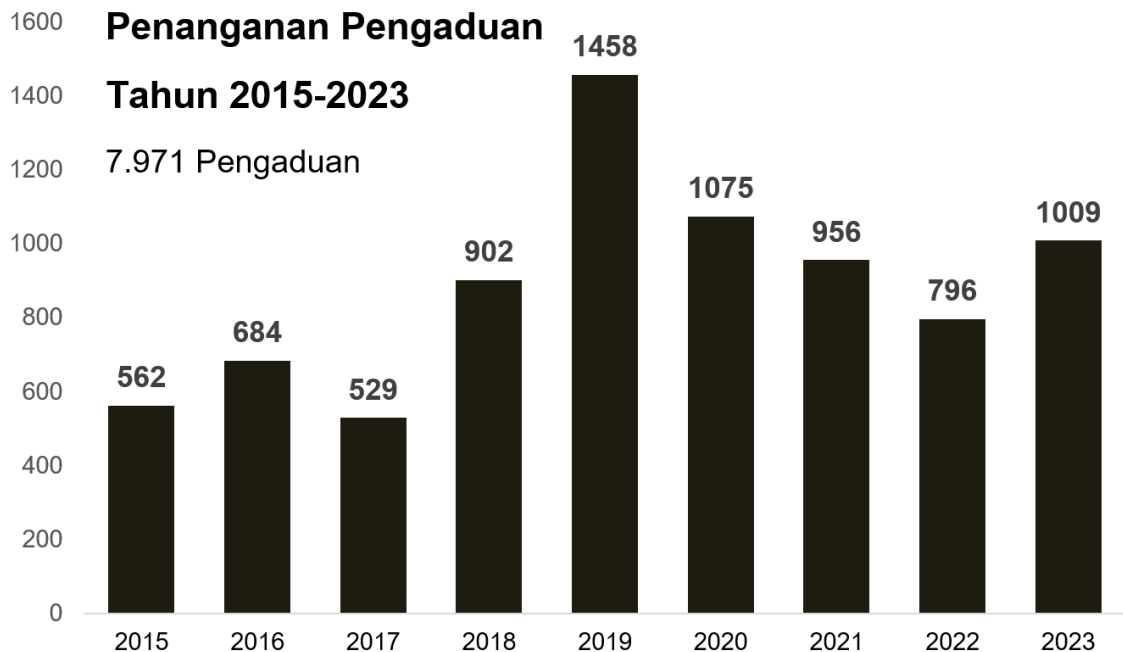
4. Wilayah Sulawesi

- a) Balai Gakkum Sulawesi/ Seksi Wilayah 1, Makasar, Sulawesi Selatan
- b) Seksi Wilayah 2- Palu, Sulawesi Tengah
- c) Seksi Wilayah 3- Manado, Sulawesi Utara
- d) Pos Gakkum Kendari, Sulawesi Tenggara
- e) Pos Gakkum Mamuju, Sulawesi Barat
- f) Pos Gakkum Gorontalo, Gorontalo

5. Wilayah Maluku dan Papua

- a) Balai Gakkum Mapua/ Seksi Wilayah 1, Manokwari, Papua Barat
- b) Seksi Wilayah 2, Ambon, Maluku
- c) Seksi Wilayah 3, Jayapura, Papua
- d) Pos Gakkum Sorong, Papua Barat
- e) Pos Gakkum Sofifi, Maluku Utara
- f) Pos Gakkum Merauke, Papua Selatan

Sehubungan dengan berbagai upaya perluasan penerimaan pengaduan tersebut, dalam kurun waktu tahun 2015 s.d 2023 secara keseluruhan Direktorat PPSALHK telah menangani 7.971 pengaduan. Secara time series jumlah pengaduan yang ditangani bervariasi, hal ini berkaitan dengan perbedaan jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada KLHK. Secara time series jumlah pengaduan yang ditangani Direktorat PPSALHK dan BPPHLHK pada tahun 2015 – 2023 digambarkan dalam diagram berikut:



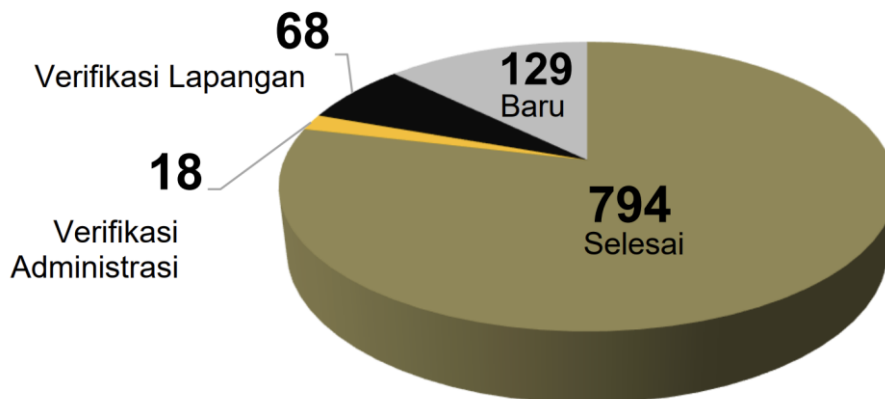
Penanganan Pengaduan (PPSALHK dan BPPHLHK) Tahun 2015-2023

Pada tahun 2023 secara keseluruhan Direktorat PPSALHK dan BPPHLHK telah menangani 1.009 pengaduan masyarakat, secara lebih rinci sebaran penanganan pengaduan yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja sebagai berikut:

Penanganan Pengaduan tahun 2023 (Dit.PPSALHK dan BPPHLHK)

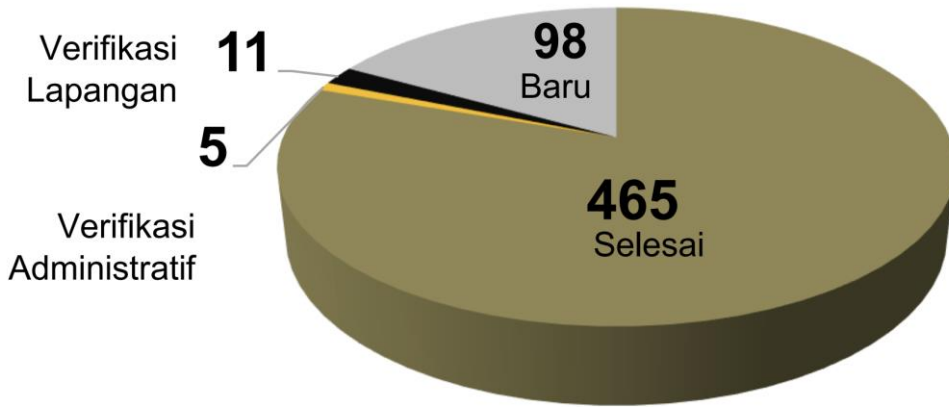
UNIT KERJA	Perusahaan			Non Perusahaan		
	Kehutanan	LH	Jumlah	Kehutanan	LH	Jumlah
Jabalnusra	9	87	96	15	25	40
Kalimantan	18	48	66	25	1	26
Mapua	2	8	10	3		3
PPSALHK	41	306	347	75	157	232
Sulawesi	16	14	30	27	10	37
Sumatera	21	32	53	54	15	69
Jumlah	107	495	602	199	208	407

Sebagaimana disebutkan di dalam Permenlhk Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/ 3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, pengelolaan pengaduan meliputi 5 (lima) tahapan kegiatan yaitu penerimaan, penelaahan, verifikasi, perumusan laporan hasil, dan tindak lanjut hasil pengaduan, dengan demikian pengaduan dikatakan tertangani apabila sudah dalam tahapan pengaduan baru, dilakukan verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, direkomendasikan ke unit lain yang terkait, maupun pengaduan yang ditindaklanjuti sampai selesai dan dikeluarkan sanksi oleh KLHK. Adapun status pengelolaan pengaduan dari 1.009 pengaduan yang masuk tahun 2023 tergambar dalam diagram berikut:



Status Penanganan Pengaduan Dit.PPSALHK dan BPPHLHK Tahun 2023

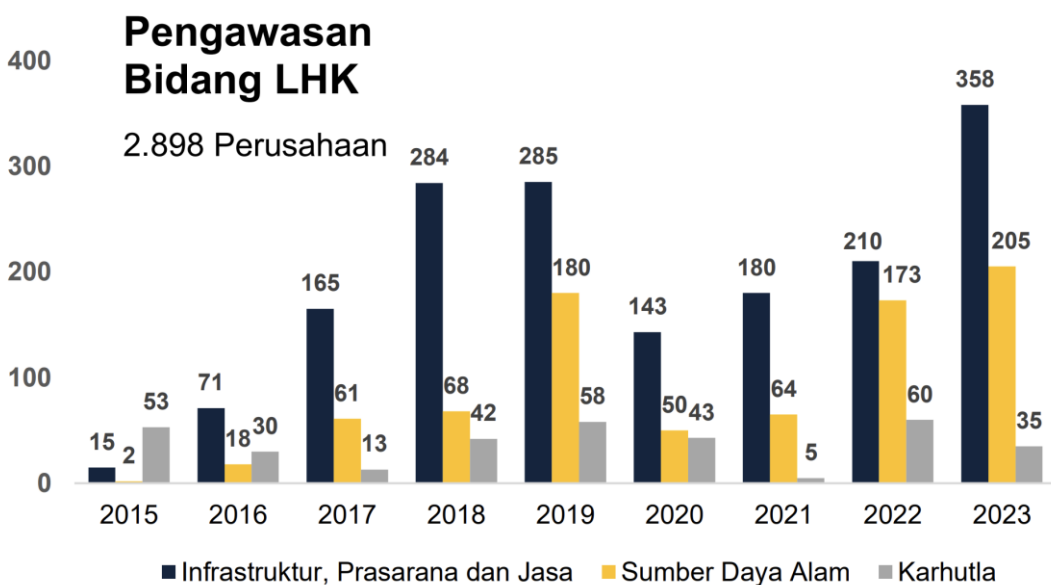
Berdasarkan data per 11 Januari 2024, secara keseluruhan Direktorat PPSALHK menangani 579 pengaduan yang terdiri dari 347 pengaduan perusahaan dan 232 pengaduan non perusahaan. **Jumlah penanganan pengaduan tersebut telah melampaui target IKK tahun 2023.** Verifikasi lapangan dilaksanakan terhadap 182 pengaduan perusahaan dan non perusahaan yang terdiri dari 3 pengaduan *carry over* tahun 2022 dan 179 pengaduan tahun 2023. Direktorat PPSALHK juga menindaklanjuti aduan kegiatan/ usaha yang belum memiliki persetujuan lingkungan yang dilaporkan oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sebanyak 23 aduan. Adapun status tindak lanjut pengaduan yang ditangani tahun 2023 ditunjukkan dalam diagram berikut:



Gambar Status Penanganan Pengaduan Dit.PPSALHK Tahun 2023

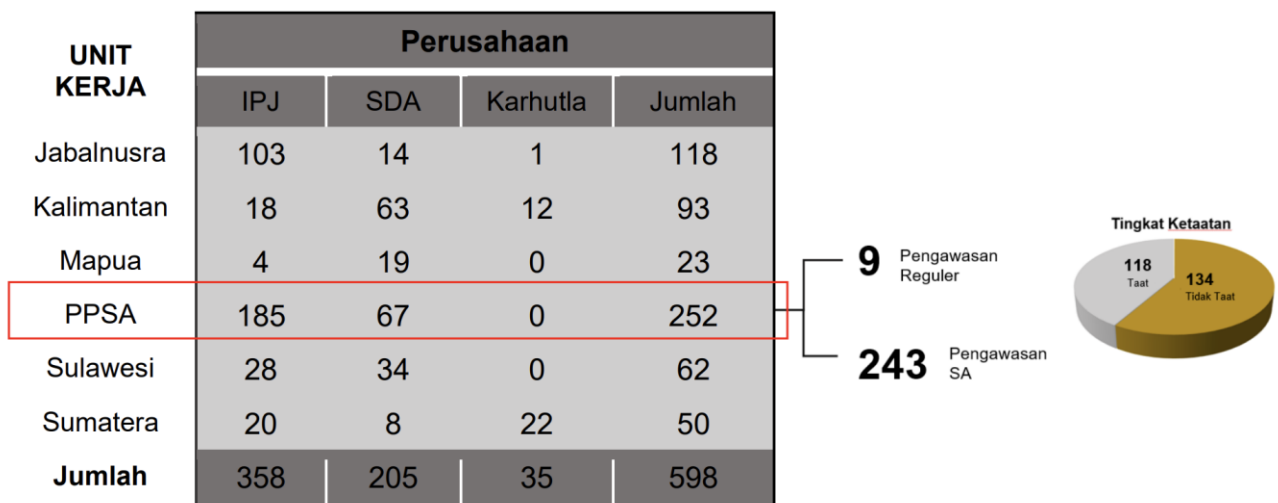
b. Komponen Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam kurun waktu 2015 s.d 2023 Direktorat PPSALHK dan BPPHLHK telah melakukan pengawasan penataan terhadap 2.898 badan usaha dan/atau kegiatan. Secara *time series* pencapaian tahun 2020 mengalami penurunan signifikan sehubungan dengan adanya pandemi Covid -19 yang berimplikasi pada penyesuaian sistem kerja. Adapun tahun 2021 s.d 2023 berangsur mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan pasca pandemi hingga pada tahun 2023 berhasil melakukan pengawasan terhadap 598 perusahaan. Pencapaian tahun 2015 s.d 2023 tergambarkan pada diagram berikut:



Gambar Pengawasan Penataan Dit.PPSALHK dan BPPHLHK Tahun 2015 - 2023

Angka capaian IKK Direktorat PPSALHK untuk komponen pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebesar 252 perusahaan yang terdiri dari 9 pengawasan reguler, 148 pengawasan penataan sanksi administrasi secara langsung dan 95 pengawasan penataan sanksi administrasi secara *online*. Dari pengawasan yang dilakukan, dapat diperoleh gambaran terkait tingkat ketaatan perusahaan yang diawasi Direktorat PPSALHK sebagai berikut:



Gambar Pengawasan Penataan Dit.PPSALHK Tahun 2023

Dari 252 pengawasan yang dilakukan, sebanyak 118 perusahaan taat dan 134 perusahaan tidak taat. Jumlah ketaatan pengawasan ini turut mendukung pencapaian target IKP Ditjen Gakkum LHK terkait “presentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan”.

c. Komponen Sanksi Administrasi

Selama tahun 2023, Direktorat PPSALHK telah menerapkan 426 sanksi administratif yang terdiri dari 149 SK penerapan sanksi administratif, 204 SK pencabutan sanksi administratif dan 73 rekomendasi pelimpahan SA kepada pemerintah daerah. Sebanyak 149 sanksi administratif yang diterbitkan tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari penanganan kasus pengaduan dan pengawasan penataan persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan pemerintah yang dilakukan oleh Direktorat PPSALHK. Adapun berdasarkan tipologi kasusnya, penerbitan sanksi administrasi tahun 2015-2023 secara rinci sebagai berikut.

Penerapan Sanksi Administratif Tahun 2015 – 2023 Berdasarkan Tipologi

NO	TIPOLOGI KASUS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
1	Pencemaran/ Kerusakan	19	87	115	121	425	130	184	241	141	1.463
2	DAS Citarum	0	0	0	27	40	24	21	0	0	112
3	Karhutla	23	18	11	10	35	11	11	4	4	127
4	Permasalahan penggunaan kawasan hutan (keterlanjuran)	0	0	0	0	0	0	6	24	4	34
Jumlah		42	105	126	158	500	165	222	269	149	1.736

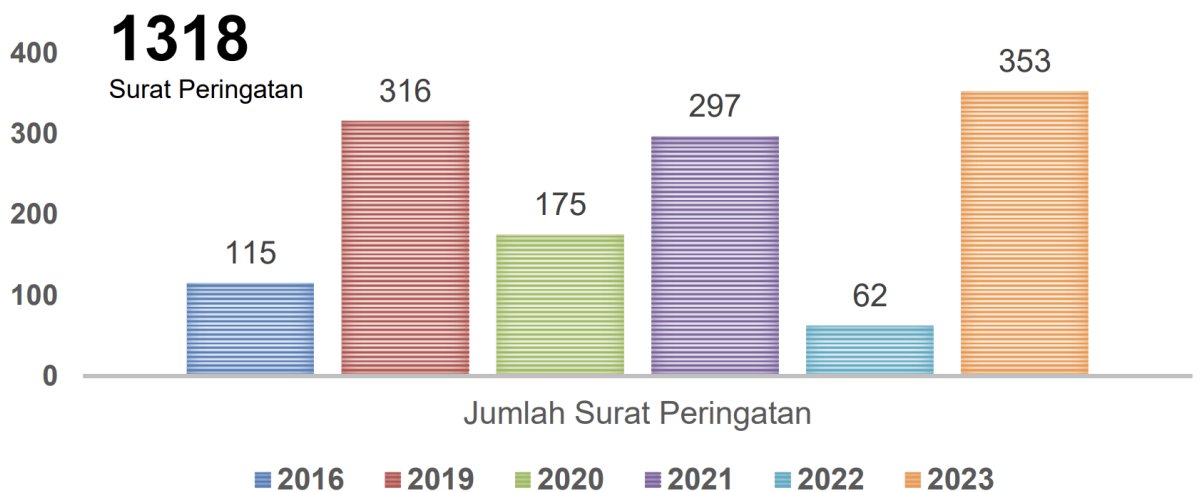
Selama kurun waktu 2015 s.d. 2023 jumlah sanksi administrasi yang diterbitkan Direktorat PPSALHK sebanyak 1.736 sanksi. Dalam periode tahun 2017-2019 jumlah sanksi administrasi yang diterbitkan mengalami peningkatan, berbanding terbalik dengan tahun 2020 yang mengalami penurunan. Terjadinya fluktuasi jumlah penerbitan sanksi administratif ini berbanding lurus dengan jumlah pengaduan dan jumlah pengawasan yang dilakukan setiap tahun. Selama periode tahun 2023 jumlah sanksi yang diterbitkan mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pengawasan tahun 2023 diprioritaskan untuk menyelesaikan *carry over* pengawasan penataan pelaksanaan sanksi administratif sebelum tahun 2022. Rincian jenis sanksi dari capaian penerapan sanksi administrasi periode 2015-2023 selengkapnya tercantum pada tabel berikut.

Penerapan Sanksi Administratif Tahun 2015 s.d 2023

NO	TIPOLOGI KASUS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
1	Teguran Tertulis	8	15	0	0	153	12	14	7	0	209
2	Paksaan Pemerintah	15	90	125	158	347	153	202	238	145	1.473
3	Pembekuan Izin	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16
4	Pencabutan Izin	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4
5	Denda Administratif	0	0	0	0	0	0	6	24	4	34
Jumlah		42	105	126	158	500	165	222	269	149	1.736

Sebagai upaya peningkatan kualitas penerapan sanksi administratif baik dalam lingkup Direktorat PPSALHK maupun pemerintah daerah, pada tahun 2023 Direktorat PPSALHK telah melaksanakan bimbingan teknis legal drafting dan webinar terkait Tata Cara Penyusunan Sanksi Administratif yang dapat diikuti oleh PLH dari seluruh daerah di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan adanya 73 rekomendasi pelimpahan penyusunan SA untuk pemerintah daerah di tahun 2023, sehingga diharapkan PLH di daerah dapat menerbitkan sanksi administratif sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku.

Selama periode tahun 2016 s.d tahun 2023 telah diterbitkan 1.318 surat peringatan. Surat peringatan tersebut diberikan atas dasar titik hotspot dengan akurasi “high” dari Laporan Harian Tim Pengendalian Hotspot KLHK dan Laporan harian kebakaran hutan dan lahan Tim Intelligence Center Ditjen Gakkum LHK yang berada di dalam konsesi Perusahaan. Selanjutnya, terhadap perusahaan yang telah diberikan surat peringatan berulang sebanyak 3 kali dan perusahaan yg dijumpai hotspot berulang dalam 1 tahun akan menjadi target pengawasan langsung.



Penerbitan Surat Peringatan Karhutla Tahun 2016 s.d 2023

Surat peringatan karhutla mewajibkan setiap pemegang izin untuk melakukan upaya langkah-langkah pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan serta pemenuhan seluruh ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan terkait. Apabila pemegang izin mengabaikan hal tersebut, akan dilakukan upaya penegakan hukum berupa sanksi administratif dan/atau penegakan hukum perdata dan/atau penegakan hukum pidana.

d. Komponen Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

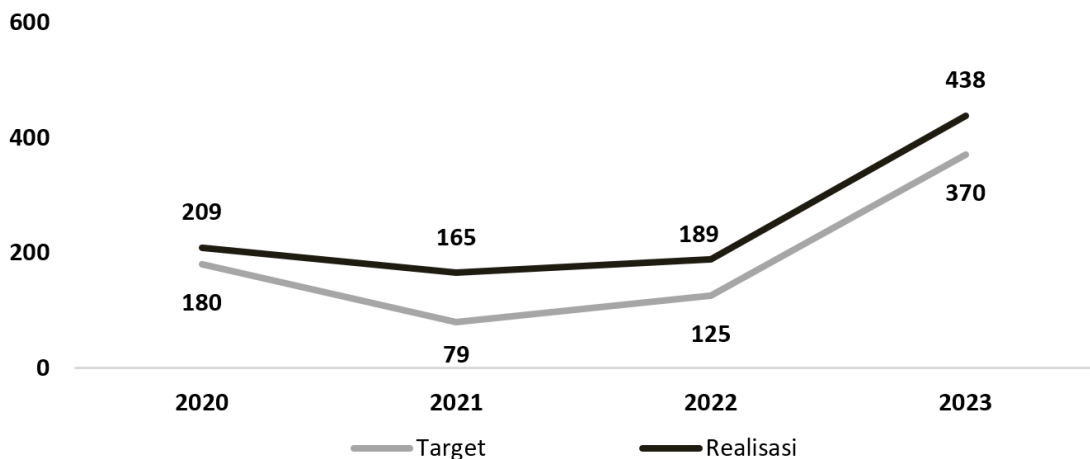
Pada tahun 2023 pelaksanaan dukungan teknis dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan, adapun pengadaan sarana prasarana diperuntukan bagi PLH di lingkup Direktorat PPSALHK. Hal ini bertujuan untuk menunjang kinerja pengaduan, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi menjadi lebih efektif dan efisien serta PLH memiliki standar penggunaan sarana prasarana dan APD yang seragam sesuai ketentuan Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengawas Lingkungan Hidup. Secara rinci, pelaksanaan dukungan teknis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Dukungan Teknis PPSA Tahun 2023

No	Nama Barang	Jumlah
1	Lemari penyimpanan peralatan pengawasan dan arsip	13 unit
2	Handphone Pengaduan	1 unit
3	Kamera Video Conference	1 unit
4	Alat Pengamat Opasitas	1 unit
5	SSD Eksternal Portable	12 unit
6	Laptop PLH Pusat dan Ipad	21 unit
7	Battery Kit	2 unit

IKK 2 Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya

Secara *time series*, Perbandingan target dan realisasi IKK 2 Jumlah PLH yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana kerja dan perjanjian kinerja tahun 2020 s.d 2023 tergambar dalam grafik berikut:



Grafik Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2

Selama periode tahun 2020 s.d tahun 2022 capaian IKK jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya dapat melampaui target yang ditetapkan. Hal ini berkorelasi dengan perluasan cakupan peserta pelatihan tidak terbatas pada PLH lingkup Ditjen Gakkum LHK melainkan juga melibatkan PLH di daerah. Di samping itu, penggunaan media *teleconference* dalam pelaksanaan pelatihan turut meningkatkan capaian kinerja Direktorat PPSALHK

Komponen Kegiatan, target dan Realisasi Direktorat PPSALHK 2023

KRO	RO	Komponen	Target	Realisasi	Persentase
Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Peningkatan kapasitas PLH	Peningkatan kapasitas PLH bidang LHK	370 orang	438 orang	118 %

Selama periode tahun 2023, terdapat penambahan alokasi anggaran APBN di tahun 2023, sehingga target IKK jumlah PLH yang ditingkatkan kapasitasnya bertambah menjadi 370 orang. Direktorat PPSALHK menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas PLH secara tatap muka (*offline*) maupun virtual (*online*) dengan capaian jumlah peserta yang mengikuti agenda *offline* sebanyak 438 orang, dan 1.895 peserta yang mengikuti agenda *online* yang terdiri dari PLH lingkup Ditjen Gakkum LHK dan PLH daerah. Untuk dapat menjangkau peserta dari daerah, diselenggarakan 4 (empat) kali webinar PLH series dengan tema beragam dengan tren dan kebutuhan di lapangan. Pada tahun 2023 juga telah dilaksanakan Musyawarah Nasional Pengawas Lingkungan Hidup se-Indonesia yang sekaligus menjadi agenda pembentukan organisasi profesi PLH.

Di samping itu, pada tahun 2023 telah dilaksanakan 9 (sembilan) *batch* diklat pembentukan PLH bekerjasama dengan Pusdiklat SDM KLHK dengan pendanaan dari anggaran Ditjen Gakkum LHK. Diklat PLH tersebut diikuti oleh 337 PLH dari seluruh daerah di Indonesia. Hal ini sekaligus sebagai upaya untuk menjawab permasalahan di daerah terkait adanya keterbatasan anggaran pelaksanaan diklat pembentukan PLH.

Secara rinci, berbagai kegiatan peningkatan kapasitas PLH yang dilaksanakan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas PLH Direktorat PPSALHK 2023

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Bimtek Teknik Negosiasi dan Komunikasi Batch I	24 - 28 Juli 2023	25 PLH Ditjen Gakkum LHK	offline
2	Sertifikasi PCUA	14 - 16 Agustus 2023	25 PLH Ditjen Gakkum LHK	offline
3	Sertifikasi PCUA	28 - 30 Agustus 2023	25 PLH Ditjen Gakkum LHK	offline
4	Webinar PLH Series I (Pengelolaan LB3 Pasca UU CK)	19 September 2023	327 PLH se-Indonesia	online

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Keterangan
5	Sertifikasi GIS dan Remote Sensing	2 - 6 Oktober 2023	15 PLH Ditjen Gakkum LHK	offline
6	Sertifikasi Pilot Drone	25 - 30 Oktober 2023	23 PLH Ditjen Gakkum LHK	offline
7	Pelatihan Legal Drafting Jimmly School	September 2023	5 anhum Dit.PPSALHK	offline
8	Webinar PLH Series II (Pengawasan PPU pasca UUCK)	23 Oktober 2023	600 PLH se-Indonesia	online
9	Bimtek Teknik Negosiasi dan Komunikasi Batch II	6 - 10 November 2023	30 PLH Ditjen Gakkum LHK	offline
10	Webinar PLH Series III (Teknik Komunikasi dalam Pengawasan)	27 November 2023	300 PLH se-Indonesia	online
11	Musyawahar Nasional PLH	18-19 Desember 2023	412 PLH se-Indonesia	hybrid
12	Bimtek Legal Drafting	18-19 Desember 2023	57 PLH & anhum Dit. PPSALHK	offline
13	Webinar PLH Series IV (Tata cara penyusunan SA)	27 Desember 2023	490 PLH se-Indonesia	online

Pada tahun 2023 Direktorat PPSALHK telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional Organisasi Profesi Pengawas Lingkungan Hidup yang dihadiri oleh PLH di seluruh Indonesia pada tanggal 6 Desember 2023. Dalam musyawarah nasional tersebut berhasil dibentuk organisasi profesi PLH Indonesia dengan nama Ikatan Pengawas Lingkungan Hidup Indonesia (IWASI) dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang telah disepakati oleh 541 peserta sidang AD-ART baik secara daring maupun luring. Pada kesempatan tersebut juga telah dilaksanakan Pelantikan pengurus harian yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara IWASI pada tanggal 7 Desember 2023 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini anggota IWASI berjumlah 838 orang, yang terdiri dari Pengawas Lingkungan Hidup lingkup Direktorat PPSALHK, Direktorat PHLHK, BPPHLHK, DLH Provinsi dan DLH Kabupaten/Kota.

IKK 3 Jumlah penerapan sanksi administratif pada permasalahan penggunaan Kawasan hutan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengedepankan penerapan *restorative justice* dan *ultimum remidium*. Salah satu bentuk penerapan asas tersebut adalah perubahan penggunaan instrumen hukum dalam pelanggaran penggunaan kawasan hutan dari yang sebelumnya menggunakan instrumen penegakan hukum pidana menjadi administratif. Salah satu turunan aturan dari UUCK adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 yang mengatur lebih lanjut pengenaan Sanksi Administratif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan.

Selama tahun 2023, telah diterbitkan 50 SK sanksi administratif terhadap pelanggaran ketidaksesuaian penggunaan Kawasan hutan. Dalam penerbitannya, dilakukan beberapa tahapan berupa inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam Kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, perhitungan besaran denda administratif yang dihitung berdasarkan luas Kawasan hutan yang digunakan untuk melakukan usaha dan kegiatan.

B. REALISASI ANGGARAN DAN FISIK DIREKTORAT PPSALHK

Realisasi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan pada Direktorat PPSALHK Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 22.142.886.000,- dengan realisasi sebesar Rp 22.047.683.120 (99,57%). Kegiatan, anggaran dan realisasi pada Direktorat PPSALHK dapat dilihat pada tabel berikut.

Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Direktorat PPSALHK Tahun 2023

No	Komponen Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Peningkatan Kapasitas PLH Bidang LHK	3.220.000.000	3.207.890.820	99,62
2	Penanganan pengaduan perusahaan	4.533.388.000	4.505.129.770	99,38
3	Penanganan pengaduan non perusahaan	954.844.000	950.469.545	99,54
4	Pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan	7.898.211.000	7.883.011.225	99,81
5	Sanksi administrasi	2.912.642.000	2.885.552.175	99,07
6	Dukungan teknis pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi	2.523.801.000	2.516.106.585	99,70
7	Penerapan denda administrasi permasalahan penggunaan Kawasan hutan	100.000.000	99.523.000	99,52
TOTAL		22.142.886.000	22.047.683.120	99,57

Anggaran pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2022 senilai Rp. 22.142.886.000,-. Kenaikan anggaran ini disebabkan adanya penambahan pagu dari anggaran PNBPN. Perbandingan anggaran dan realisasi tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Anggaran dan Realisasi Direktorat PPSALHK
Tahun 2018 – 2023**

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Tahun 2018	19.841.494.000	19.200.601.746	96,3%
2	Tahun 2019	31.528.400.000	31,145,081,774	98,8%
3	Tahun 2020	14.184.025.000	14.057.169.770	99,1%
4	Tahun 2021	9.581.500.000	9,575.423.401	99,9%
5	Tahun 2022	9.543.316.000	9.540.782.017	99,9%
6	Tahun 2023	22.142.886.000	22.047.683.120	99,6%



Realisasi Fisik

Berdasarkan volume yang telah ditargetkan, realisasi fisik pada kegiatan yang dilaksanakan Direktorat PPSALHK selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi Fisik Direktorat PPSALHK Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Suboutput Kegiatan	Komponen Kegiatan	Target	Realisasi	Presentase
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK	Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang ditangani	Penanganan pengaduan perusahaan	205 Badan Usaha	347 Badan Usaha	169
		Penanganan pengaduan non perusahaan	230 Pengaduan	232 Pengaduan	101
		Pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan	218 Badan Usaha	252 Badan Usaha	115
		Sanksi administrasi	240 Sanksi	426 Sanksi	177
		Dukungan Teknis PPSA	1 Layanan	1 Layanan	100
Jumlah PLH yang ditingkatkan kapasitasnya	-	Peningkatan kapasitas PLH bidang LHK	370 orang	438 orang	118
Jumlah penerapan sanksi administratif pada permasalahan penggunaan Kawasan hutan	-	Penerapan denda administrasi permasalahan penggunaan Kawasan hutan	50 Badan Usaha	50 Badan Usaha	100

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Sumber Daya} = \frac{\text{Persentase capaian kinerja tahun berjalan}}{\text{Persentase capaian anggaran tahun berjalan}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan >1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan <1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

Berdasarkan rumus diatas, maka perbandingan persentase capaian efisiensi penggunaan sumber daya pada Direktorat PPSALHK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Kegiatan	Persentase Capaian Fisik	Persentase Capaian Keuangan	Efisiensi Sumber Daya
1	Penanganan pengaduan perusahaan	169	99,38	1,70
2	Penanganan pengaduan non perusahaan	101	99,54	1,01
3	Pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan	115	99,81	1,15
4	Sanksi administrasi	177	99,07	1,78
5	Dukungan teknis pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi	100	99,70	1,003
6	Peningkatan kapasitas PLH bidang LHK	118	99,62	1,18
7	Penerapan denda administrasi permasalahan penggunaan Kawasan hutan	100	99,52	1,004

Berdasarkan tabel diatas, seluruh komponen memiliki nilai efisiensi sumber daya >1 dengan rata-rata adalah 1,26. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya Direktorat PPSALHK termasuk kategori efisien.

D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan yang dicapai dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. Untuk keberhasilan capaian kinerja berdasarkan uraian Bab III, dapat disimpulkan bahwa ketiga Indikator Kinerja Kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan.

Adapun dalam pencapaian target tersebut ditemukan kendala/hambatan yang dihadapi serta alternatif solusi untuk penyelesaian masalah tersebut.

1. Belum optimalnya pengelolaan pengaduan melalui website pengaduan (dimulai dari registrasi s.d tindak lanjut hasil pengaduan) sehingga mempersulit pemantauan dan kontrol proses penanganan pengaduan. Perlu dilakukan perbaikan sistem tata Kelola pengaduan diantaranya dengan cara:
 - a) pembentukan tim kerja pengelolaan pengaduan Direktorat PPSALHK per tipologi kasus;
 - b) reaktivasi tim pemantauan untuk masing-masing balai untuk keperluan evaluasi laporan dan perencanaan;
 - c) rekonsiliasi data dan monitoring serta evaluasi pengelolaan pengaduan secara periodik;
 - d) perbaikan dan maintenance website pengaduan dan whatsapp BOT;
 - e) pembaharuan SOP Pengaduan;
 - f) aktivasi akun pengaduan untuk Pemerintah Daerah;
 - g) bimbingan teknis dan penguatan koordinasi dengan unit lain terkait pengelolaan pengaduan kehutanan.
2. Tidak adanya fasilitas untuk menerima pengadu yang datang secara langsung.
Perlu untuk disediakan fasilitas yang dapat memwadahi pengadu untuk menyampaikan aduan secara langsung, oleh karena itu tahun 2024 akan dilakukan pengaktifan kembali sekretariat/pos pengaduan di lobby Blok 1 Gd Manggala Wanabakti.
3. Belum optimalnya integrasi aplikasi penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi.
Aplikasi Integrasi Direktorat PPSALHK perlu dilanjutkan untuk dikembangkan dengan berfokus pada cleansing dan penyeragaman data pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi, serta dilakukan integrasi data dengan unit teknis KLHK lain.

4. Tidak adanya fasilitas untuk menerima pengadu yang datang secara langsung.
Dalam pelaksanaan penanganan pengaduan dan pengawasan penataan, Direktorat PPSALHK sangat memerlukan data pelaporan perusahaan yang disampaikan melalui platform pelaporan *online* tersebut sebagai bahan evaluasi awal untuk memperoleh gambaran kondisi perusahaan. Di samping itu, data ini kedepannya juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan secara tidak langsung. Oleh karena itu untuk tahun 2024 direncanakan untuk melanjutkan proses integrasi sistem informasi data pelaporan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengawasan yang dilakukan.
5. Masih banyaknya jumlah carry over sanksi administrasi yang perlu dipantau progress penyelesaiannya.
Sampai dengan Desember 2023, terdapat 610 sanksi administratif tahun 2016 s.d 2023 yang belum taat dan 181 diantaranya belum diawasi. Pada tahun 2024 akan disusun mekanisme pendelegasian penyusunan sanksi administratif yang dilakukan oleh PLH yang melakukan pengawasan, termasuk dari BPPHLHK, dengan demikian diharapkan dapat mempercepat proses penerbitan dan pemantauan pelaksanaan SA lebih optimal. Di samping itu perlu untuk segera disahkan aturan terkait penerapan denda administratif untuk dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak segera menaati ketentuan sanksi administratif.
6. Jumlah dan Kompetensi PLH Daerah
Sampai dengan tahun 2023, jumlah PLH Ditjen Gakkum LHK dan PLH di daerah yang terdata sebanyak 941 orang. Meskipun demikian, jumlah PLH yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah izin yang diterbitkan pemerintah. Perlu adanya pemerataan jumlah PLH di seluruh daerah untuk memenuhi kebutuhan pengawasan perizinan tiap daerah, berkoordinasi dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Selain itu perlu juga adanya pemerataan kompetensi PLH di daerah dengan cara pengadaan pelatihan dan Bimtek secara rutin.

7. Belum adanya aturan turunan pelaksanaan pengawasan pasca terbitnya UU Cipta Kerja.

Setelah terbitnya UU Cipta Kerja terdapat pergeseran peraturan terkait pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi administrasi sehingga diperlukan NSPK pelaksanaan pengawasan yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu untuk segera ditetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk pelaksanaan pengawasan yang selanjutnya dapat dijadikan acuan pelaksanaan pengawasan untuk PLH di seluruh Indonesia.



The background image shows an industrial plant with a prominent tall, cylindrical chimney stack topped with a lattice structure. The facility is composed of various metal frameworks, pipes, and cylindrical tanks. In the foreground, a group of five people are standing on a paved area. Three of them are wearing blue hard hats and dark blue work clothes, while two others are wearing white hard hats and light-colored work clothes. They appear to be in a discussion or inspection. A large black circle is overlaid on the right side of the image, containing the text 'BAB IV PENUTUP' in white, bold, sans-serif font.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini merupakan sarana untuk memberikan informasi yang memadai (akuntabel) tentang capaian dari target yang telah ditetapkan serta penggunaan anggaran pada pelaksanaan kegiatan di Direktorat PPSALHK.

Adapun hasil pencapaian target yang telah ditetapkan adalah:

1. IKK 1: Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK sebanyak 423 badan usaha. Pencapaian jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK sebanyak 599 badan usaha atau sebesar 141% dari target yang telah ditetapkan.
2. IKK 2: Jumlah PLH yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 370 orang. Pencapaian jumlah PLH yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 438 orang atau sebesar 118% dari target yang telah ditetapkan.
3. IKK 3: Jumlah penerapan sanksi administratif pada permasalahan penggunaan kawasan hutan sebanyak 50 badan usaha. Pencapaian jumlah penerapan sanksi administratif pada permasalahan penggunaan kawasan hutan sebanyak 50 badan usaha atau sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil yang telah dicapai oleh Direktorat PPSALHK dan berdasarkan hasil uji efisiensi penggunaan sumber daya, semua komponen kegiatan tercapai dengan nilai >1. Adapun secara rata-rata keseluruhan komponen memiliki nilai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,26 maka Direktorat PPSALHK dalam menyelenggarakan kegiatannya telah efisien dalam penggunaan sumber dayanya.

LAMPIRAN

DAFTAR PENGADUAN YANG DITANGANI DIT PPSALHK

No	No Register	Sumber/ Media Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kategori Pengaduan	Kategori Terlapor	Terlapor	Rekomen dasi
1	230001	Surat	02-Jan-2023	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	Lingkungan Hidup	Perusahaan	PT Umi Pasir Mandiri	PSLH
2	230002	Surat	02-Jan-2023	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	Lingkungan Hidup	Perusahaan	KMP Permata Lestari II	PSLH
3	230003	Surat	02-Jan-2023	JAWA TENGAH	KABUPATEN JEPARA	Lingkungan Hidup	Perusahaan	PT Haluan Segara Line	PSLH
4	230004	Surat	02-Jan-2023	JAWA BARAT	KABUPATEN GARUT	Lingkungan Hidup	Perusahaan	PT Bitumen Mersende Indonesia	PSLH
5	230005	Surat	02-Jan-2023	JAWA TENGAH	KABUPATEN JEPARA	Lingkungan Hidup	Perusahaan	PT Pelayaran Pelangi Sindumulia	PSLH
6	230006	Surat	02-Jan-2023	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN WAKATOBI	Lingkungan Hidup	Perusahaan	PT Barokah Gemilang Perkasa	PSLH
7	230008	Datang Langsung	02-Jan-2023	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT	Lingkungan Hidup	Perusahaan	Restoran Leviticus 11	Pemda
8	230009	Surat	02-Jan-2023	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PESISIR SELATAN	Lingkungan Hidup	Non Perusahaan	Wali Nagari Pasir Palangai	Sektor Lain
9	230010	Surat	02-Jan-2023	JAWA TENGAH	KABUPATEN JEPARA	Lingkungan Hidup	Perusahaan	Pemilik usaha tambak	PSLH
10	230011	Website	03-Jan-2023	JAMBI	KABUPATEN MUARO JAMBI	Kehutanan	Non Perusahaan	jkbkjhjbhk vh	Data Tidak Lengkap
11	230012	Website	04-Jan-2023	JAWA TENGAH	KABUPATEN JEPARA	Lingkungan Hidup	Non Perusahaan	TEGUH SANTOSO	PSLH
12	230013	Website	04-Jan-2023	JAWA TENGAH	KABUPATEN JEPARA	Lingkungan Hidup	Non Perusahaan	AKHMAD SANTOSO	Pengaduan tidak terbukti
13	230014	Website	05-Jan-2023	JAWA TENGAH	KABUPATEN JEPARA	Lingkungan Hidup	Non Perusahaan	Endang Saefudin	PSLH
14	230015	Surat	05-Jan-2023	RIAU	KABUPATEN ROKAN HULU	Kehutanan	Non Perusahaan	Dewi Robinar	Penegakan Hukum Pidana
15	230016	Surat	06-Jan-2023	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK BARAT	Lingkungan Hidup	Perusahaan	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Lembar	Sanksi Administratif
16	230017	Surat	06-Jan-2023	JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR	Kehutanan	Perusahaan	PT Eigerindo Multi Produk Industry	Unit Lain



No	No Register	Sumber/ Media Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kategori Pengaduan	Kategori Terlapor	Terlapor	Rekomen dasi
570	230997	Surat	01-Oct-23	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR	Lingkungan Hidup	Perusahaan	PT Sampoerna Agro	Sanksi Administratif
571	230998	Surat	01-Oct-23	SUMATERA SELATAN	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	Lingkungan Hidup	Perusahaan	PT Proteksindo Utama Mulia	Penyusunan Rekomendasi
572	230999	Data Hotspot	07-Jun-23	LAMPUNG	TULANG BAWANG	Lingkungan Hidup	Perusahaan	PT Sweet Indo Lampung	Pengaduan tidak terbukti
573	231000	Data Hotspot	07-Jun-23	LAMPUNG	TULANG BAWANG	Lingkungan Hidup	Perusahaan	PT Indo Lampung Perkasa	Pengaduan tidak terbukti
574	231001	Surat	01-Dec-23	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUARA ENIM	Kehutanan	Non Perusahaan	Oknum	Penyusunan Rekomendasi
575	231002	Surat	01-Dec-23	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	Lingkungan Hidup	Perusahaan	PT Weda Bay Nickel	Penegakan Hukum Pidana
576	231003	Surat	02-Dec-23	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG	Lingkungan Hidup	Perusahaan	PT Hakatex	Pemda
577	231004	Surat	13-Sep-23	JAWA TENGAH	KABUPATEN SEMARANG	Lingkungan Hidup	Perusahaan	PT Glory Industrial Semarang	Sanksi Administratif
578	231006	Surat	01-Aug-23	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	Lingkungan Hidup	Perusahaan	PT Indah Kiat Pulp & Paper - Tangerang Mill	Sanksi Administratif



REKAPITULASI PENGAWASAN 2023

No	Nama Perusahaan	Kabupaten / Kota	Provinsi	Jenis Industri	Sektor	Ketaatan	Pengawas	Jenis Pengawasan
1	PT Pabrik Kertas Indonesia	Kab Mojokerto	Jawa Timur	Pulp dan Kertas	IPJ	Taat	PPSA	SA ONLINE
2	PT Anugerah Aneka Industri	Tangerang	Banten	Otomotif	IPJ	Taat	PPSA	SA ONLINE
3	PT Boscho Pratama Group	Jombang	Jawa Timur	Pengelola Limbah B3	IPJ	Tidak Taat	PPSA	SA ONLINE
4	PT Lestari Banten Energi	Serang	Banten	PLTU	SDA	Taat	PPSA	SA ONLINE
5	PT Sinar Indah Kertas	Kudus	Jawa Tengah	Kertas	IPJ	Taat	PPSA	SA ONLINE
6	PT Nagamas Kurnia	Bandung	Jawa Barat	Tekstil	IPJ	Tidak Taat	PPSA	SA ONLINE
7	PT Musi Prima Coal	Muara Enim	Sumatera Selatan	Tambang Batubara	SDA	Taat	PPSA	SA ONLINE
8	PT Ithaca Resources	Berau	Kalimantan Timur	Prasarana	IPJ	Taat	PPSA	SA ONLINE
9	PT Angkasa Pura I Cabang Bandara Sam Ratulangi Manado	Manado & Minahasa Utara	Sulawesi Utara	Bandar Udara	IPJ	Taat	PPSA	SA ONLINE
10	PT Semen Bosowa Maros	Maros	Sulawesi Selatan	Semen	IPJ	Taat	PPSA	SA ONLINE
11	PT Wiraswasta Gemilang Indonesia	Tangerang	Banten	Pengelola Limbah B3	IPJ	Taat	PPSA	SA ONLINE
12	PT Cimanggis Sakti	Depok	Jawa Barat	Kimia	IPJ	Taat	PPSA	SA ONLINE
13	PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Ternate	Ternate	Maluku Utara	Distribusi Migas	SDA	Taat	PPSA	SA ONLINE
14	PT Pertamina EP Tambun Field	Bekasi & Karawang	Jawa Barat	EP Migas	SDA	Taat	PPSA	SA ONLINE
15	PT Asia Palem Lestari	Kubu Raya	Kalimantan Barat	Perkebunan Kelapa Sawit	SDA	Taat	PPSA	SA ONLINE
16	PT Kasongan Bumi Kencana	Katingan	Kalimantan Tengah	Tambang Mineral	SDA	Taat	PPSA	SA ONLINE
17	PT Alam Cendana	Tangerang	Banten	Logam	IPJ	Tidak Taat	PPSA	SA ONLINE
18	PT Bintangmas Cahaya Internasional	Serang	Banten	Pengelola Limbah B3	IPJ	Taat	PPSA	SA ONLINE
19	PT Ayoe Indotama Textile	Cimahi	Jawa Barat	Tekstil	IPJ	Tidak Taat	PPSA	SA ONLINE
20	PT Laju Makmur Sentosa	Cimahi	Jawa Barat	Tekstil	IPJ	Tidak Taat	PPSA	SA ONLINE
21	PT Mewah Niagajaya	Cimahi	Jawa Barat	Tekstil	IPJ	Tidak Taat	PPSA	SA ONLINE
22	PT Menara Cipta Mulia	Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung	Tambang Mineral	SDA	Taat	PPSA	SA ONLINE
23	PT Grand Mandiri Utama	Sintang	Kalimantan Barat	Perkebunan Kelapa Sawit	SDA	Taat	PPSA	SA ONLINE
24	PT Logam Jaya Abadi	Bekasi	Jawa Barat	Pengelola Limbah B3	IPJ	Taat	PPSA	SA ONLINE
25	PT Tes Amm Indonesia	Bekasi	Jawa Barat	Pengelola Limbah B3	IPJ	Taat	PPSA	SA ONLINE
26	PT Delta Pasific Indotuna	Bitung	Sulawesi Utara	Perikanan	SDA	Taat	PPSA	SA ONLINE



No	Nama Perusahaan	Kabupaten / Kota	Provinsi	Jenis Industri	Sektor	Ketaatan	Pengawas	Jenis Pengawasan
587	PT Tawabu Mineral Resources	Kutai Timur	Kalimantan Timur	Tambang Batubara	SDA	Tidak Taat	PPSA	SA LANGSUNG
588	PT Samudera Puranabile Abadi	Bitung	Sulawesi Utara	Perkapalan	IPJ	Tidak Taat	PPSA	SA LANGSUNG
589	PT Bahana Indokarya Global	Jakarta Timur	DKI Jakarta	Pergudangan	IPJ	Tidak Taat	PPSA	SA LANGSUNG
590	PT Citra Tobindo Sukses Perkasa	Sorolangun	Jambi	Tambang Batubara	SDA	Tidak Taat	SUMATERA	SA LANGSUNG
591	PT Kunango Jantan	Padang Pariaman	Sumatera Barat	Beton	IPJ	Tidak Taat	SUMATERA	SA LANGSUNG
592	PT Duo Patra Sukses	Probolinggo	Jawa Timur	Distribusi Migas	SDA	Taat	PPSA	SA ONLINE
593	PT Pertamina (Persero) Terminal Bahan Bakar Minyak Camplong	Sampang	Jawa Timur	Distribusi Migas	SDA	Taat	PPSA	SA ONLINE
594	Soetrisno Kertawidjaya	Tegal	Jawa Tengah	Tambang Mineral	SDA	Tutup	PPSA	SA ONLINE
595	PT Panasonic Manufacturing Indonesia	Depok	Jawa Timur	Elektronik	IPJ	Taat	PPSA	SA ONLINE
596	PT Eka Jaya Gasindo	Badung	Bali	Distribusi Migas	SDA	Taat	PPSA	SA ONLINE
597	PT Sai Apparel Industries	Grobogan	Jawa Tengah	Tekstil	IPJ	Taat	PPSA	SA ONLINE
598	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Cilegon	Banten	Transportasi	IPJ	Tidak Taat	PPSA	SA ONLINE

Data Sanksi Administratif yang Diterbitkan Tahun 2023

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan	Lokasi		Nomor SK Sanksi Administratif	Jenis SA	Status Ketaatan
			Kab./Kota	Provinsi			
1	PT Ledo Lestari	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit	Kab. Bengkayang	Kalimantan Barat	SK.37/MENLHK-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/1/2023	Paksaan Pemerintah	Belum taat
2	PT Adindo Hutani Lestari	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Tanaman Industri	Kab. Bulunga, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, dan Kab. Tana Tidung	Kalimantan Utara	SK.38/MENLHK-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/1/2023	Paksaan Pemerintah	Belum taat
3	PT Sumber Rejeki Ekonomi	Pertambangan batubara	Kab. Barito Utara	Kalimantan Tengah	SK.39/MENLHK-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/1/2023	Denda Administratif	Belum taat
4	PT Mitra Setia Tanah Bumbu	Pertambangan batubara	Kab. Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan	SK.40/MENLHK-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/1/2023	Denda Administratif	Belum taat
5	PT Yastra Energy	Pertambangan batubara dan terminal khusus dan jalan hauling	Kab. Barito Utara	Kalimantan Tengah	SK.41/MENLHK-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/1/2023	Denda Administratif	Belum taat
6	PT Trimegah Bangun Persada	Pertambangan bijih nikel	Kab. Halmahera Selatan	Maluku Utara	SK.121/MENLHK-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/1/2023	Denda Administratif	Taat
7	PT Etam Manunggal Jaya	Pertambangan batubara	Kab. Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	SK.337/MENLHK-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/1/2023	Paksaan Pemerintah	Belum taat
8	PT Tolan Tiga Indonesia	Perkebunan kelapa sawit	Kab. Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara	SK.338/MENLHK-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/1/2023	Paksaan Pemerintah	Belum taat
9	PT Carvinna Trijaya Makmur	Pengalengan ikan dan pengawetan ikan	Kota Bitung	Sulawesi Utara	SK.339/MENLHK-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/1/2023	Paksaan Pemerintah	Belum taat
10	PT Bintangmas Cahaya Internasional	Pengumpulan dan pengangkutan limbah B3	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	SK.341/MENLHK-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/1/2023	Paksaan Pemerintah	Taat
11	PT Sri Indrapura Sawit Lestari	Pabrik minyak kelapa sawit	Kab. Siak	Riau	SK.342/MENLHK-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/1/2023	Paksaan Pemerintah	Taat
12	PT Cheil Jedang Indonesia - Pasuruan Plant	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari	Kab. Pasuruan	Jawa Timur	SK.343/MENLHK-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/1/2023	Paksaan Pemerintah	Belum taat



No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan	Lokasi		Nomor SK Sanksi Administratif	Jenis SA	Status Ketaatan
			Kab./Kota	Provinsi			
145	PT Agro Bukit	Perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit	Kab. Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	SK.13590/MENLH K-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/12/2023	Paksaan Pemerintah	Belum taat
146	PT Pahala Bahari Nusantara	Industri pembekuan ikan	Kab. Bekasi	Jawa Barat	SK.13591/MENLH K-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/12/2023	Paksaan Pemerintah	Belum taat
147	PT Great Giant Pineapple	Industri pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran bukan kacang-kacangan	Kab. Lampung Tengah	Lampung	SK.13592/MENLH K-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/12/2023	Paksaan Pemerintah	Belum taat
148	PT Indika Logistic & Support Services	Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	SK.13593/MENLH K-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/12/2023	Paksaan Pemerintah	Belum taat
149	PT Kariangau Gapura Terminal Energi	Penyimpanan minyak dan gas bumi	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	SK.13594/MENLH K-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/12/2023	Paksaan Pemerintah	Belum taat